



**ALTERNATIF PENYELESAIAN EKSEKUSI JAMINAN
FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

MUHAMAD TOYIB

1910622003

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA**

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

2021

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan secara benar.

Nama : Muhamad Toyib

NRP : 1910622003

Tanggal : 17 Juli 2021

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 17 Juli 2021

Yang Menyatakan,



Muhamad Toyib

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran”
Jakarta, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Toyib
NRP : 1910622003
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya meyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**ALTERNATIF PENYELESAIAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA
KENDARAAN BERMOTOR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

Berserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak bebas royalty ini Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Juli 2021

Yang menyatakan

Muhamad Toyib

PENGESAHAN


Tesis diajukan oleh :

Nama : Muhamad Toyib
NRP : 1910622003
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : **ALTERNATIF PENYELESAIAN EKSEKUSI
JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian pernyataan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.



Dr. Beni Harmoni Harefa, SH., LL.M
Ketua Penguji



Dr. Suherman, SH., LL.M.
Penguji I



Dr. Iwan Erar Joesof, SH., MKn
Penguji II/ Pembimbing



Dr. H. Abdul Halim, M.Ag.
Dekan



Dr. Beni Harmoni Harefa, SH., LL.M
Ka. Prodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 17 Juli 2021



Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 telah menghilangkan *Lex Specialis* dari Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyebabkan kerugian bagi kreditur dimana tak dapat lagi terlindungi hak kreditur atas kerugian yang dideritanya. Dimana diharuskannya proses peradilan perdata yang begitu panjang dan banyak memakan waktu apabila Debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana alternatif pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ? 2) Bagaimana konsep mengembalikan fungsi parate eksekusi dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia?. Penelitian tesis ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan peristiwa hukum yang diteliti ditemukan bahwa 1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dapat dijadikan sebagai alternatif dalam menyelesaikan suatu permasalahan eksekusi jaminan fidusia 2) Diperlukannya kehadiran Negara untuk melakukan eksperimentasi kelembagaan yaitu dengan merevisi Undang-undang Jaminan fidusia dan membuat Lembaga Parate Eksekusi. Saran dalam penelitian ini adalah 1) untuk Kreditur agar melakukan proses gugatan dengan menggunakan gugatan sederhana terhadap eksekusi jaminan fidusia. 2) untuk Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia agar merevisi Undang-undang Jaminan fidusia dan membuat Lembaga Parate Eksekusi yang diberi wewenang berdasarkan Undang-undang untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang dapat memberikan kemudahan terhadap pelaksanaan eksekusi sehingga tidak diperlukannya lagi proses hukum acara perdata pada pengadilan negeri yang banyak memakan waktu dan biaya sehingga prosesnya pun tidak sebanding dengan nilai objeknya.

Kata Kunci: Fidusia, Gugatan Sederhana, Lembaga Parate Eksekusi

Abstract

The constitutional court decisions no. 1 puu-xvii / 18 / 2019 has removed lex specialis from act no 42 years 1999 on fiduciary security . Which had caused losses to for a creditor where could no longer protected a creditor the right for the losses suffered by his .Where civil judicial process comes from such a long and many of their time when debtors are not hand over any assurance in voluntary object .Highlights the difficulty in this research is 1) how alternative of execution for the fiduciary security in the aftermath of the award the constitutional court number puu-xvii / 18 / 2019 ? 2) how the concept to restore the function of parate execution in the act of fiduciary security ?The kind of research the thesis research was used in the law normative by using law events is as high as it was also found that 1) regulations the supreme court number 4 in 2019 at on changes to the supreme court number 2 the year 2015 on simple can be used as a means of settling a lawsuit as an alternative in resolving the problem execution fiduciary security shall 2) to the need to undertake the presence of institutional experimentation to revise the act of fiduciary security and make parate institutions execution .Advice in this research was 1) for his creditor to put in place the process of a lawsuit by using simple a lawsuit execution as the fiduciary security 2) For the government the unitary state of the republic of indonesia to revise the act of fiduciary security and make parate institutions execution that is given the authority based on the act to carry out the execution of an object fiduciary security shall who hoped to enable with the implementation of the execution so that it would not to the need again civil legal proceedings the event in the district court which many take time and the cost so that the process would not in proportion to the value of its object.

Keywords: Fiduciary, Small Cliam Court, Parate Execution Institution.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **ALTERNATIF PENYELESAIAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019**.

Adapun maksud dan tujuan dari Penulisan ini adalah sebagai syarat yang telah ditentukan untuk mencapai gelar Magister pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jakarta. Banyak permasalahan dan hambatan yang penulis alami dalam menyelesaikan tugas akhir ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segala rendah hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil sehingga penulisan tugas akhir ini dapat terselesaikan.

Penulis mengucapkan terimakasih tidak terhingga kepada:

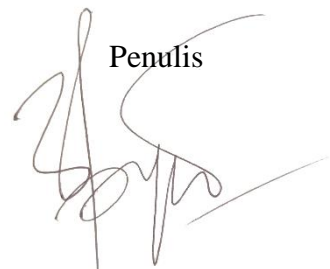
1. Bapak Dr. H. Abdul Halim, M.Ag. Selaku Dekan Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jakarta.
2. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, SH., LL.M. Selaku Ketua Penguji dan Ketua Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jakarta.
3. Bapak Dr. Iwan Erar Joesof, SH., MKn. Selaku Penguji II dan Pembimbing Materi yang telah memberikan masukan dalam kelancaran penulisan Tesis ini.
4. Bapak Dr. Suherman, SH., LL.M. Selaku Penguji I yang telah memberikan masukan dalam kelancaran penulisan Tesis ini.
5. Seluruh Dosen Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jakarta.
6. Seluruh Pihak Kesekretariatan Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jakarta.

7. Isteri tercinta Siti Alimah, S.H. yang memberikan semangat terus menerus.
8. Ibunda tercinta Maisaroh serta Ayahanda Tercinta Alm. Romli semoga Allah SWT senantiasa menempatkan kedua orang tua Penulis diatas kemuliaan dan Surganya.
9. Kepada Kaka dan Adik-adik ku Tersayang : kaka ku Siti Rohmah, Adik ku Sarwati, Adik ku Susi Kustia Ningsih, Adik ku Iskandar, Adik ku Jumali.
10. Kawan-kawan Mahasiswa/i Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jakarta Angkatan 2019. Terima kasih telah berjuang bersama dan menemani dimasa sulit pandemic Covid-19. Baik dalam jurusan Hukum Bisnis, Hukum Kesehatan dan Hukum Pidana.

Semoga Allah SWT memberikan Rahmat dan inahNya kepada kita semua dan juga kiranya Penulisan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum bisnis.

Jakarta,17 Juli 2021

Penulis



Muhamad Toyib

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii-viii
DAFTAR ISI	ix-x
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Rumusan Masalah	7
I.3. Tujuan Penelitian	7
I.4. Manfaat Penelitian	8
I.5. Kerangka Teori	8
I.5.1. Teori Kepastian Hukum	8
I.5.2. Teori Keadilan	12
I.5.3. Teori Perlindungan Hukum	15
I.6. Kerangka Konseptual	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
II.1. Perjanjian	21
II.1.1. Pengertian Perjanjian	21
II.1.2. Syarat Sah Suatu Perjanjian	23
II.1.3. Hapusnya Suatu Perjanjian	25
II.2. Jaminan Fidusia	26
II.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan Fidusia	26

II.2.2. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia	29
II.2.3. Penerbitan Eksekusi Jaminan Fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusia	29
II.2.4. Tata cara Eksekusi Sertifikat Fidusia	33
II.3. Eksekusi	37
II.3.1. Pengertian Eksekusi	37
II.3.2. Asas-asas eksekusi	37
II.3.3. Hambatan Eksekusi Secara Teknis.....	41
II.3.4. Hambatan Eksekusi secara yuridis	43
II.4. Gugatan Sederhana	45
II.4.1. Pengertian Gugatan Sederhana	45
II.4.2. Sejarah Gugatan Sederhana	46
BAB III METODE PENELITIAN	50
III.1. Jenis Penelitian	50
III.2. Pendekatan Penelitian	51
III.3. Sumber Data.....	51
III.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	52
III.5. Teknik Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
IV.1. Alternatif Penyelesaian Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor PascaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019	54
IV.2. Konsep mengembalikan fungsi parate eksekusi dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.....	57
BAB V PENUTUP	69
V.1. Kesimpulan	69
V.2. Saran	69-70
DAFTAR PUSTAKA	71-74
RIWAYAT HIDUP	